

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN
WEWENANG PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG
MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus
Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Direktur Utama dan Direktur
Keuangan Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta Periode
2009-2010)**

TESIS

Oleh:

**PUJI KURNIAWAN
2002190107**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN
WEWENANG PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG
MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Direktur Utama
dan Direktur Keuangan Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang
Djakarta Periode 2009-2010)**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**PUJI KURNIAWAN
2002190107**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Puji Kurniawan
NIM : 2002190107
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Jakarta Periode 2009-2010)” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 23 Mei 2023



PUJI KURNIAWAN



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PADA
BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan
Oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan Perusahaan Umum Pengangkut
Penumpang Djakarta Periode 2009-2010)

Oleh :

Nama : Puji Kurniawan
NIM : 2002190107
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana Strata
Dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 23 Mei 2023
Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.
NIDN/NIDK : 191632/0302117904

Program Studi Hukum Program Magister
Ketua

Dr. Wiwik Sri Widjarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN : 141104/0327096504

Pembimbing II

Dr. Armunanto Hutajayan, S.E., S.H., M.H.
NIP/NIDK : 211059/8986240022

Program Pasca Sarjana
Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha, M.Pd., PA.
NIP/NIDN : 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 23 Mei 2023 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Puji Kurniawan
NIM : 2002190107
Program : Magister Hukum
Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta Periode 2009-2010)”, oleh tim penguji yang terdiri dari :

	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, SH,MH.	Ketua	
2.	Dr. Armunanto Hutahaeen, SE,SH, MH.	Anggota	
3.	Prof.Dr. Mompang L. Panggabean, SH, MHum.	Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puji Kurniawan.
NIM : 2002190107
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Di Jakarta (Perum PPD) Pada Periode 2009-2010)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 23 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,

Puji Kurniawan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Allah, karena pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini adalah sebuah kajian yang diberi judul “TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta (Perum PPD) Pada Periode 2009-2010)”.

Tujuan dari penulisan Tesis ini adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S-2) di Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana di Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Dhaniswara, K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
4. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, SH, MH selaku Pembimbing I, yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.

5. Dr. Armunanto Hutahaean, SE, SH, MH, selaku Pembimbing II, yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mata perkuliahan.
6. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H.,M.Hum. selaku Dosen dan Penguji yang telah berbagi pengetahuan dan arahan untuk melengkapi Penulisan Tesis.
7. Kepada Dosen Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
8. Istri dan anak tercinta atas dukungan doanya sehingga dapat menyelesaikan studi di Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, saran atau masukan sangat Penulis butuhkan demi perbaikan tesis ini. Harapan Penulis bahwa tesis ini berguna bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Pdana.

Jakarta, 23 Mei 2023

Penulis

Puji Kurniawan

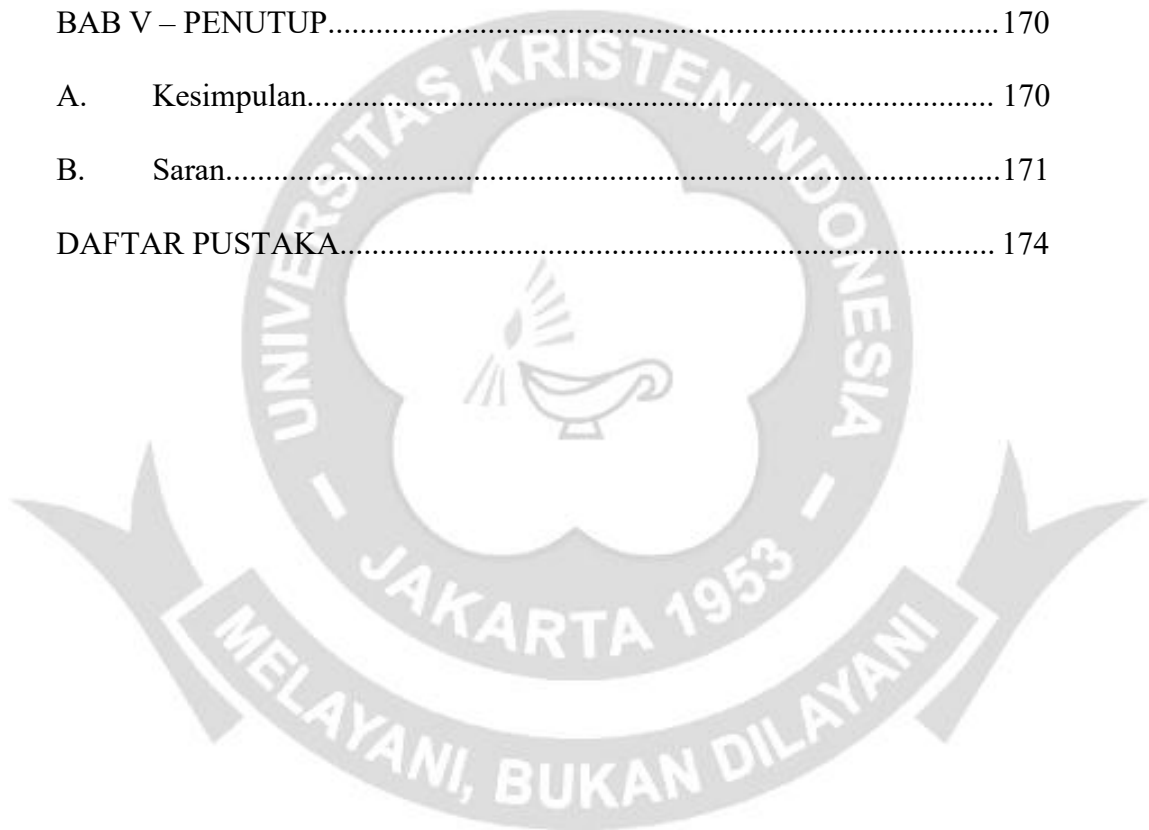
DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan Keaslian.....	ii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing.....	iii
Halaman Persetujuan Tim Penguji.....	iv
Halaman Persetujuan Publikasi.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Abstrak.....	xii
<i>Abstract</i>	xiii
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Teori Konseptual.....	15
1. Kerangka Teoritis.....	15
2. Kerangka Konsep.....	22
E. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Lokasi Peneltian.....	25
4. Data Penelitian.....	26

5.	Tahapan Penelitian.....	26
6.	Metode Analisis Data.....	27
BAB II - TINJAUAN PUSTAKA.....		29
A.	Penyalahgunaan Wewenang.....	29
B.	Tindak Pidana Korupsi.....	38
C.	Peran BUMN Dalam Pertumbuhan dan Penguatan Ekonomi Negara.....	48
D.	Kerugian Negara.....	58
BAB III - UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.....		62
A.	Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.....	62
B.	Unsur-Unsur Penyalahgunaan Wewenang di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum PPD Pada Periode 2009 s/d 2010.....	69
C.	Definisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	79
D.	Unsur Kerugian Negara.....	85
1.	Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi.....	92
2.	Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Perdata.....	93
3.	Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	94
E.	Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	

Dalam Perspektif Hukum Perdata.....	97
F. Figur Hukum Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara.....	99
BAB IV – KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM	
PERPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN	
OLEH DIREKTUR UTAMA DAN DIREKTUR KEUANGAN	
PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUT PENUMPANG	
DJAKARTA (PERUM PPD) PERIODE 2009-2010.....	
A. Beberapa Ketentuan Khusus Dalam Hukum Pembuktian	
Tindak Pidana Korupsi.....	106
B. Kekuatan Pembuktian Dari Unsur Penyalahgunaan Wewenang	
Pada Tindak Pidana Korupsi.....	112
1. Hukum Pembuktian Khusus Tindak Pidana Korupsi.....	112
2. Kekuatan Pembuktian Di Badan Usaha Milik	
Negara Yang Dilakukan Oleh Direktur Utama	
dan Direktur Keuangan Perusahaan Umum Pengangkut	
Penumpang Djakarta Periode 2009 s/d 2010.....	114
C. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana	
Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif.....	120
D. Analisis Kasus dan Kelengkapan Pembuktian Terhadap Pelaku	
E. Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Umum Pengangkutan	
Penumpang Djakarta (Perum PPD) Pada Periode 2009 s/d 2010.....	128
F. Korupsi dan Kejahatan Korupsi Dari Perspektif Tindak	
Pidana Korupsi.....	145

1.	Unsur Melawan Hukum (<i>wederrechtelijke</i>).....	152
2.	Unsur Kerugian Keuangan Negara.....	163
3.	Kerugian Nyata Yang Ditimbulkan Atas Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Direktur Keuangan Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD) Sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.....	164
BAB V – PENUTUP.....		170
A.	Kesimpulan.....	170
B.	Saran.....	171
DAFTAR PUSTAKA.....		174



ABSTRAK

Nama : Puji Kurniawan
NIM : 2002190107
Program Studi/Kekhususan : Hukum / Hukum Pidana
Judul Tesis : TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta (Perum PPD) Pada Periode 2009-2010)

Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan pada Badan Usaha Milik Negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam Penegakan Hukum dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur “melawan hukum” dan “menyalahgunakan wewenang” yang selalu dibarengi dengan “kerugian negara” sebagai dasar untuk tersangka dan mendakwa seseorang pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana korupsi dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta sebesar Rp. 2.375.302.640,- (terbilang dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur Administrasi Keuangan Perum PPD pada periode bulan Januari 2009 sampai dengan November 2010, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Agar seluruh stakeholder memahami peran khususnya dalam mengambil setiap kebijakan dan pengawasan dalam setiap sektor lembaga khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mencegah praktik tindak pidana korupsi serta mereformasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengelola dan menjalankan perseroan dan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dan juga harus secara proporsional mengacu pada SOP dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

ABSTRACT

Name : Puji Kurniawan
NIM : 2002190107
Study Programme/Speciality : Law/Criminal Law
Thesis Title : *JURIDICAL REVIEW OF LEGAL ENFORCEMENT CORRUPTION CRIME ON THE CRIME OF ABUSE OF AUTHORITY IN STATE-OWNED ENTERPRISES WHICH CAUSES STATE FINANCIAL DAMAGES (Case Study of Corruption Crime Committed by the President Director and Finance Director of the General Company for Passenger Transport in Djakarta (Perum PPD) in the Period 2009-2010).*

This thesis analyses the acts of corruption committed by the President Director and Finance Director of a State-Owned Enterprise that caused state financial losses in Law Enforcement in the crime of corruption contained in Article 3 of Law Number 20 of 2001 Jo Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption (PTPK Law). In the process of law enforcement, there are many elements of "against the law" and "abuse of authority" which are always accompanied by "state losses" as a basis for suspecting and charging an official who commits a criminal act of corruption. This research method is juridical normative legal research which is carried out by examining by conducting a search for regulations and literature related to the problem under study that there has been an event suspected of being a criminal act of corruption by deliberately committing an act against the law and or abuse of authority which resulted in state financial losses at the Djakarta Passenger Transport General Company amounting to Rp. 2,375,302,640. 2,375,302,640, - (fairly two billion three hundred seventy five million three hundred two thousand six hundred and forty rupiah), committed by the President Director and Director of Financial Administration of Perum PPD in the period January 2009 to November 2010, as referred to in Article 2 paragraph (1) and or Article 3 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 Jo Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP). So that all stakeholders understand their special role in making every policy and supervision in every sector of the institution, especially in State-Owned Enterprises (BUMN) in order to prevent the practice of corruption and reform the Corruption Eradication Law. Managing and running the company and must comply with laws and regulations and must also proportionally refer to the SOP in carrying out its functions and duties.